

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB)

PT. BPRS ALMADINAH TASIKMALAYA PERSERO

TAHUN 2026



Lembar Persetujuan

RENCANANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB)

TAHUN 2026

PT. BPRS ALMADINAH TASIKMALAYA (PERSRODA)

Dengan ini kami menyatakan :

Telah disusun RAKB Tahun 2026 PT BPRS Almadinah Tasikmalaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitmen dan Perusahaan Publik.
2. Pedoman teknis Bagi Bank terkait Implementasi POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitmen dan Perusahaan Publik, Tahun 2018.

Demikian Laporan RAKB Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik dan keselarasan antara kepentingan 3P yaitu *Profit* (Ekonomi), *People* (Social) dan *Planet* (Lingkungan).

Tasikmalaya, 12 Desember 2025

PT. BPRS ALMADINAH TASIKMALAYA (Perseroda)



ISMAIL MARJUKI
Komisaris Utama



M. KAHARUDIN YASIN
Direktur Utama

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya (Perseroda) menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026 sebagai pondasi dan landasan strategik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan Bank.

BPRS Almadinah Tasikmalaya sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas secara berkelanjutan. Serta sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) melalui dana yang yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka BPRS Almadinah Tasikmalaya berkewajiban dalam membiayai nasabah secara selektif dengan menghindarkan diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Keterkaitan positif (*positive linkage*), BPRS menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip ‘triple bottom line’ yaitu people (social), planet (lingkungan) dan profit (ekonomi) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek lingkungan, social dan tata kelola atau Environmental, social and governance (ESG) dengan berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) agar dapat secara efektif mengimplementasikan keuangan untuk periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan atau periode 2026 - 2031.

Rujukan yang digunakan sebagai acuan PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan/ atau Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Visi Misi dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan	4
1.3 Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	6
1.4 Road Map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	7
1.5 Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan ..	8
1.6 Seluruh Pihak Penanggungjawab Program Keuangan Berkelanjutan..	9
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	
2.1 Rujukan Keuangan Berkelanjutan	10
2.2 Keterlibatan Pihak Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	10
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	
3.1 Rencana Strategis Bank	11
3.2 Kapasitas Organisasi	12
3.3 Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	13
3.4 Kerjasama dengan Pihak Eksternal	13
3.5 Strategi Komunikasi	13
3.6 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi	14
3.7 Pendekatan Analisis Faktor Penentu	14
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	
4.1 Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung Keuangan Berkelanjutan	16
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	
5.1 Pegawai, Pejabat, Unit Kerja yang Bertanggungjawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi	18
5.2 Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	18
5.3 Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	19
5.4 Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak dapat Tercapai Tujuan yang Diinginkan	19
5.5 Penutup	22

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Latar Belakang

Peresmian PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Almadinah Tasikmalaya oleh Walikota Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2010 merupakan tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya dalam bidang perbankan. Pendirian bank ini berkat dorongan dan dukungan umat Islam di "kota santri" yang menghendaki adanya Lembaga Keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.

Pendirian BPRS Almadinah lahir seiring dengan keluarnya Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 yang kemudian diubah melalui Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya.

Konsep program Keuangan Berkelanjutan bagi PT BPRS Almadinah memiliki tujuan besar yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing Bank sehingga mampu tumbuh dan menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, serta pada saat yang bersamaan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Menerapkan Keuangan Berkelanjutan artinya memiliki tata kelola yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang penerapan Keuangan Berkelanjutan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Tata kelola perusahaan sudah merupakan konsep yang lebih lama dan lebih dikenal dibandingkan Keuangan Berkelanjutan. Menerapkan Keuangan Berkelanjutan juga berarti mempraktekkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata Kelola yang baik meningkatkan daya tahan dan daya saing perusahaan dengan cara mengembangkan pengawasan terhadap risiko di seluruh organisasi. Langkah ini akan menurunkan risiko secara signifikan karena ditangani sebelum memiliki dampak yang besar.

Kesadaran yang makin meningkat di seluruh insan PT BPRS Almadinah untuk pembangunan berkelanjutan menciptakan dunia bisnis yang sehat, yaitu bisnis hijau di mana prinsip-prinsip keberlanjutan diterapkan. Saat ini, semua memberikan prioritas akses bisnis dan kerjasama hanya kepada pelaku bisnis yang memiliki visi sama yaitu keberlanjutan

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT BPRS Almadinah adalah komitmen untuk menjaga berkelanjutan usaha bank dengan

bertindak dalam kerangka tanggung jawab terhadap nasabah, karyawan, pemegang saham, lingkungan, serta memberikan kontribusi kepada pengembangan perekonomian setempat dan masyarakat luas pada umumnya.

1.2 Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

a. Visi :

Dalam upaya mencapai tujuan usahanya dalam implementasi keuangan berkelanjutan BPRS senantiasa berpedoman kepada Visi yaitu :

“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”

Visi tersebut menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah perusahaan. Visi ini juga merupakan serangkaian ide dari para pendiri tentang gambaran masa depan yang hendak dicapai oleh perusahaan

b. Misi :

Misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi yang sudah ditetapkan atau dapat dikatakan misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Visi PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya (Perseroda) yaitu :

1. Menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dengan usaha Perbankan Syariah yang sehat
2. Meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan amanah
3. Menghadirkan keunggulan produk syariah di tengah masyarakat.
4. Memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Memberikan Profit dan Benefit seoptimal mungkin kepada seluruh Stakeholder

c. Nilai - nilai perusahaan

Nilai-Nilai Budaya Kerja PT. BPRS AL-MADINAH TASIKMALAYA

1. Mandiri, Aktif dan Maju Dengan Bingkai Semangat Kebersamaan (*Team Work*)
2. Juju Adil Dan Amanal (*Integrity*)
3. Wasilah , Memberi Maslahat Dan Mengalirkan Berkah (*Spiritualisme*)
4. Jadi Yang Terbaik Dengan Spirit Mencapai Keunggulan (*Excellence*)

5. Dapat Memberikan Kepuasan, Menjadi Mitra Terpercaya Dan Menguntungkan Pelanggan (*Customer Focus*)

1.3 Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ini dibuat dengan tujuan untuk turut serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Tujuan penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah :

- a. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
- b. Meningkatkan daya tahan dan daya saing Bank melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;
- c. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan
- d. Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Terdapat 3 (tiga) prioritas implementasi Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu:

- a. Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- b. Pengembangan kapasitas internal Bank; atau
- c. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (standard operating procedure) Bank yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, BPRS menjalankan ketiga prioritas tersebut untuk mencapai sasaran Keuangan Berkelanjutan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan portofolio dan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup. Rencana pelaksanaan ketiga prioritas tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas bank dan dituangkan dalam Rencana Aksi

Keuangan Berkelanjutan (RAKB) jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, implementasi dari RAKB tersebut disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan.

1.4 Road Map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

PT BPRS Almadinah Tasikmalaya membagi penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) menjadi 2 (dua) rencana aksi yaitu rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang.

Rencana aksi jangka pendek adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan rencana aksi jangka panjang adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu rencana 5 (lima) tahun.

a. Rencana Satu Tahun

Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Triwulan-1	Penugasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepada unit kerja yang ditunjuk untuk pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Memiliki Unit Kerja yang mengelola program aksi keuangan berkelanjutan	Terbentuknya Unit Kerja yang diberi Tanggung jawab untuk Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan
	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan	Memiliki Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan	Tersusun dan terbitnya Pedoman BPRS ttg Keuangan Berkelanjutan
	Penyusunan produk pembiayaan yang ramah lingkungan dan social	Menjadi BPRS sahabat UMKM	Pembiayaan UMKM Mikro tumbuh $\geq 10\%$ YoY
	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025	Menyampaikan laporan Tahunan ttg Laporan berkelanjutan	Terpenuhinya kewajiban kepada pihak regulator
Triwulan-2	Sosialisasi atau Pelatihan internal tentang pedoman pelaksanaan keuangan berkelanjutan	Peningkatan awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Pegawai memahami atas program rencana aksi keuangan berkelanjutan
	Penyaluran pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai RBB	Portofolio pembiayaan UMKM Mikro	Sepanjang Tahun

Triwulan-3	Workshop penilaian risiko pembiayaan	Menilai risk appatate dan risik tolerance	Meminimalisir risiko pembiayaan
Triwulan-4	Diskusi Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan	Mengetahui Sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan dan pos-pos biaya yang bisa dilakukan efisiensi	Pendapatan sesuai rencana dan Biaya tidak melebihi anggaran dalam RBB
	Evaluasi dan Penyusunan RAKB Tahun 2027	Mengetahui progress kinerja keuangan berkelanjutan	Indikator pencapaian yang sesuai dengan rencana

b. Rencana Lima Tahun

No	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
1	2026	Terdapat Standar Oparasional Prosedur (SOP) dan penanggungjawab atas Keuangan Berkelanjutan	Memiliki SOP dan/atau SK Direksi untuk menunjuk Unit Kerja yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan.
2	2027	Memiliki produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang terus tumbuh	Produk atau jasa keuangan memiliki pertumbuhan pembiayaan minimal naik 5% dari tahun awal.
3	2028	Menggandeng pemerintah atau pihak lainnya untuk mendanai program keuangan berkelanjutan	Memiliki program dana bergulir untuk keuangan berkelanjutan
4	2029	Effisiensi penggunaan listrik dan kertas untuk mendukung program go green	Penghematan listrik dan kertas sebesar 5% dari tahun lalu.
5	2030	Pembelajaran dan sosialisasi kepada Nasabah	Edukasi kepada nasabah kategori kegiatan usaha berkelanjutan

1.5 Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang bersumber dari internal perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Unit kerja Penanggung Jawab aktivitas / program kerja dengan melibatkan setiap organ dalam struktur organisasi.

- 1.6 Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan**
- a. Bagian Bisnis menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan unit kerja terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
 - b. Bagian Operasional mengelola pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
 - c. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program.
 - d. Aksi Keuangan Berkelanjutan BPRS. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Pembiayaan dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
 - e. Bagian Marketing dan Jasa dengan menerbitkan atau mengembangkan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya (pengembangan produk).
 - f. Unit kerja Teknologi Informasi melakukan penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan.
 - g. Bagian Sumber Daya Insani melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
 - h. Bagian Umum melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1 Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

1. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I di Indonesia 2015 - 2019.
2. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 - 2025.
3. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
5. Surat Keputusan Direksi PT BPRS Almadinah Tasikmalaya (Perseroda) No. 002/01.BPRS.AT/SK-DIR/I/2025 tentang Pedoman Integritas Pelaporan Keuangan

2.2 Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Laporan RAKB ini disusun oleh internal BPRS yaitu Bagian Bisnis yang didukung oleh Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan RAKB oleh Bagian Bisnis.
2. Pengembangan Kapasitas Internal yang melibatkan Bagian SDI dan Bagian Operasional.
3. Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Bagian Bisnis, Bagian Operasional, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
4. Langkah strategis khususnya terkait penentuan prioritas program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka pendek dan jangka panjang diarahkan oleh Direksi.

BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

3.1 Rencana Strategis Bank

a. Penguatan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

- Menetapkan kebijakan pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.
- Menghindari pembiayaan pada sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah dan berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan.
- Mengembangkan mekanisme seleksi nasabah yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan usaha mereka.

b. Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah Berkelanjutan

- Pembiayaan ijarah untuk energi terbarukan seperti panel surya bagi UMKM dan rumah tangga.
- Pembiayaan murabahah untuk pertanian berkelanjutan, termasuk pengolahan limbah organik dan pertanian organik.
- Produk tabungan hijau (*green savings*) yang dikhkususkan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan.
- Wakaf produktif untuk mendukung proyek sosial dan ekonomi berbasis syariah yang ramah lingkungan.

c. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Keuangan Berkelanjutan

- Mengadakan pelatihan bagi karyawan mengenai keuangan berkelanjutan berbasis syariah dan analisis risiko ESG.
- Sosialisasi kepada nasabah dan masyarakat terkait manfaat ekonomi hijau dan pentingnya investasi syariah yang berkelanjutan.

d. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi

- Mengembangkan sistem pemantauan digital untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari portofolio pembiayaan.
- Pemanfaatan teknologi keuangan syariah (fintech syariah) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi.

e. Kemitraan dan Kolaborasi

- Bermitra dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pengembangan produk keuangan berkelanjutan.
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi sosial dalam mendukung ekonomi hijau berbasis syariah.

3.2 Kapasitas Organisasi

Untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sesuai strategi dan program yang telah disusun, maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten pada bidang masing-masing, maka PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya (Perseroda) sudah memenuhi struktur organisasi sbb :

Pengurus

Nama	Jabatan	Pendidikan
Ismail Marjuki	Komisaris Utama	Strata 1
Kartawan	Komisaris	Strata 3
M. Kaharudin Yasin	Direktur Utama	Strata 2
Ipin Tajul Arifin	Anggota DPS	Strata 2

Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja

Nama	Jabatan	Pendidikan
Nuni Nurbaedah	Kabag Oprasional	Strata 1
Nazwar Saymsu	Kabag Bisnis	Strata 1
Lia Anggarsari	PE Audit Intern	Strata 1
Rustanto	PE MR & Kepatuhan	Diploma 3

3.3 Sumber Daya Insani

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten pada bidang masing-masing PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

1. Jumlah Komposisi Pegawai BPRS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	20
3	Diploma 3	4
4	SMA Atau Sederajat	9
Total		34

2. Jumlah Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	24
2	Perempuan	7
Total		31

3.4 Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

a. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan BPRS selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai pada tabel di bawah ini.

1. Kinerja Keuangan (Juta Rupiah)

No	Indikator	2025 (Nov)	2024 (Des)	2023 (Des)
1	Total Aset	79.605.188	84.461.560	94.821.753
2	Laba/Rugi Berjalan	(744.104)	610.833	744.936
3	Modal Inti	17.415.326	15.194.000	15.194.000
4	Total DPK	44.864.300	43.043.123	30.815.477
5	Total Pembiayaan	65.410.762	69.934.494	73.975.147

2. Rasio Keuangan

No	Rasio	2025 (Nov)	2024 (Des)	2023 (Des)
1	CAR/KPMM	40.35	51.61	45.92
2	Cash Ratio	22.40	24.58	26.67
3	ROA	(1.07)	0.88	1.17
4	BOPO/REO	107.93	95.18	92.08
5	FDR	148.03	162.48	172.08
6	NPF	23.78	16.61	7.89

3.5 Kapasitas Teknis

Peningkatan kapasitas teknis teknologi Bank menjadi perhatian utama antara lain dengan penyediaan aplikasi / software berbasis teknologi digital dan infrastruktur teknologi untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan bisnis di masa mendatang.

3.6 Kerjasama Dengan Pihak Eksternal

Dalam program pengembangan kapasitas internal, PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya akan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan ketentuan regulasi.

3.7 Strategi Komunikasi

Secara internal PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya terus berkomunikasi agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif diantaranya:

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas.
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.

Selanjutnya secara eksternal PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya memberikan edukasi kepada pihak nasabah agar memiliki kepedulian dalam menjalankan usahanya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3.8 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat Bagian Bisnis yang rutin dilakukan per minggu untuk memonitor kinerja seluruh unit bisnis.
3. Rapat Unit Kerja yang dilaksanakan oleh Bagainnya masing-masing untuk membahas permasalahan bisnis dan operasional.

3.9 Pendekatan Analisis Faktor Penentu

Adapun faktor dari penentu pembuatan RAKB ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threats) dalam menganalisa potensi yang dimiliki oleh PT BPRS Almadinah Tasikmalaya.

Ulasan secara garis besar mengenai analisis SWOT tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan (*strengths*)
 - PT BPRS Almadinah Tasikmalaya (Perseroda) yang merupakan milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - Lembaga keuangan Mikro yang berprinsip syariah.
- b. Kelemahan (*weaknesses*)
 - Sarana dan prasarana yang belum memadai di antaranya: gedung, lahan parkir, fasilitas kerja.
 - Keberadaan BPRS yang masih belum di kenal luas oleh masyarakat Kota Tasikmalaya sebagai Bank milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

c. Peluang (*opportunities*)

- Keberadaan Pasar tradisional di beberapa wilayah yang belum disentuh oleh BPRS.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya banyak yang belum tergarap.
- Tenaga honor di dinas-dinas terkait.

d. Ancaman (*threats*)

- Resesi ekonomi akan memberi dampak resiko terhadap dunia usaha.
- Persaingan sesama Bank / Lembaga keuangan Mikro cukup tinggi dan cenderung meningkat.
- Pesaing yang memiliki teknologi yang lebih baik.

BAB IV

PRIORITAS DAN URAIAN

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

4.1 Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

1. Dasar Pemikiran

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan.

Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan pembenahan standar operasional prosedur (SOP).

2. Kegiatan

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	SDI Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Jan 2026	Penugasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepada unit kerja yang ditunjuk untuk pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Unit Kerja yang mengelola program aksi keuangan berkelanjutan	Kabag Ops / SDI
2	Feb 2026	Penyusunan produk pembiayaan yang ramah lingkungan dan social	Tim Bisnis	Kabag Bisnis
3	Sepanjang Tahun	Penyaluran pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai RBB	AO	Kabag Bisnis

4	Mei 2026	Sosialisasi atau Pelatihan internal tentang pedoman pelaksanaan keuangan berkelanjutan	Bahan SOP dan Narsum	Kepatuhan dan Manajemen Risiko
5	Jul 2026	Workshop penilaian risiko pembiayaan	Bahan matari dan narsum	Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6	Okt 2026	Diskusi Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan	Bahan matari dan narsum	Kabag Ops dan SPI

3. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan diatas membutuhkan dana ± Rp 5 juta yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/praktisi dalam implementasinya.

4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan oleh unit kerja terkait.

5. Tantangan dan Rencana Ke depan

Tantangan Eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, volatilitas nilai tukar Rupiah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lainnya sebagainya.

BAB V
TINDAK LANJUT
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

5.1. Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatas berada di bawah Direktur Kepatuhan dan dievaluasi setiap periode akhir kegiatan. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara spesifik Peran Direktur Kepatuhan dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh PE Kepatuhan dalam memantau pelaksanaan Keuangan berkelanjutan dari sisi Kepatuhan melakukan monitoring risiko Pembiayaan dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutansesuai kerangka penerapan manajemen risiko.

5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektifitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:

Penentuan Waktu Untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan :

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Semesteran	Fungsi kepatuhan dan SPI
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Akhir November Tahun Berjalan	Bagian bisnis bekerjasama dengan unit kerja terkait
3	Laporan Keuangan Keberlanjutan	Paling lambat akhir Bulan April Tahun 2027	Bagian Bisnis bekerjasama dengan Unit Kerja Terkait

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapandan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindaklanjut sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya .

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi sebagai berikut:

1. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
2. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan
 - a. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja diunit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan nasabah.
 - b. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 - c. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.

3. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.
 - a. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah di manapun dan kapanpun.
 - b. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
 - c. PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
 - d. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi BPRS Go Digital dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja
 - e. PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.

- 4. Penyaluran Pembiayaan berbasis lingkungan**
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
 - b. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari Pembiayaan yang disalurkan.
 - c. Menguatkan kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
 - d. Menentukan batas penyaluran Pembiayaan minimal yang berlaku bagi internal bank, mengingat meski aturan sudah dibuat tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran Pembiayaan minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
 - e. Memberikan insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

- 5. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktivitas operasional Bank.**

Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi / mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/ limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yangterdampak;

- 6. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan**

- a. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan**

perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.

- b. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
- c. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

5.5. Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.

Tasikmalaya, 12 Desember 2025

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah
ALMADINAH TASIKMALAYA (Perseroda)



ISMAIL MARJUKI
Komisaris Utama



M KAHARUDIN YASIN
Direktur Utama